

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ni Putu Gina Sukma Antari¹
Ida Bagus Panji Sedana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali-Indonesia
e-mail: ginasukmaa23@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Pengumpulan data menggunakan metode observasi nonpartisipan dengan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

The financial performance of local government is reflection of successful the local government in managing the finance of region. This research aims to determine the significance of the effect locally generated revenue and capital expenditure on the financial performance of the local government. This research is conducted on the Regencies/Cities in Bali Province. The data used in this research is secondary data from the Government Finance Statistics report of Regencies/Cities in Bali Province year 2011-2015. The nonparticipant observation method is used for data collection and the analysis technique used is the multiple linear regression. The research result using the multiple linear regression analysis shows that the locally generated revenue has positive and significant effect towards the local government's financial performance. Capital expenditure has negative and significant effect towards the local government's financial performance.

Keywords: *locally generated revenue, capital expenditure, financial performance of local government*

PENDAHULUAN

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Rosemarry *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova dan Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang lebih kompleks karena variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah beraneka ragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya dengan menggunakan satu variabel (Mahsun dkk., 2007:165).

Rondonuwu dkk. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31). Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membuat peraturan dalam pembangunan daerah sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib untuk diberikan setiap tahunnya (Lucky, 2013). Menurut Halim (2008:230), alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola

keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Halim (2008:241) rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pada suatu daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan agar dapat meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Tabel 1. berikut menyajikan data mengenai pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015.

Tabel 1.
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jembrana	568,261,335,000	651,398,304,000	745,334,983,000	823,352,410,000	903,622,270,000
Tabanan	886,307,834,000	1,056,319,329,000	1,253,026,819,000	1,367,078,412,000	1,615,933,308,000
Badung	1,850,767,401,000	2,618,695,201,000	2,954,662,971,000	3,459,586,016,000	3,735,129,565,000
Gianyar	834,194,082,000	1,066,239,511,000	1,248,415,648,000	1,400,913,781,000	1,527,797,536,000
Klungkung	502,868,134,000	590,231,294,000	711,405,235,000	827,028,807,000	907,139,632,000
Bangli	543,348,390,000	622,718,265,000	702,229,030,000	793,647,679,000	873,469,027,000
Karangasem	820,520,892,000	907,014,578,000	1,041,577,611,000	1,248,392,023,000	1,367,577,564,000
Buleleng	1,054,706,126,000	1,196,436,251,000	1,390,657,293,000	1,543,584,631,000	1,937,771,345,000
Denpasar	1,150,071,695,000	1,379,049,166,000	1,547,605,213,000	1,727,968,713,000	1,786,400,782,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016

Secara keseluruhan pendapatan daerah setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali mengalami peningkatan pada tahun 2011-2015 namun jika ditinjau dari segi pertumbuhannya, pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2011-2015 yang ditunjukkan pada Tabel 1. Pada tahun 2013 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 28,66 persen dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 14,54 persen dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya. Pada Tabel 1. dapat diketahui juga pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Pendapatan daerah merupakan

komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Mohammed *et al.*, 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah.

Mahmudi (2009:16) berpendapat bahwa, terdapat dua jenis sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerah. Pertama, sumber-sumber keuangan daerah yang sudah ditetapkan sebagai sumber penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, sumber-sumber keuangan daerah juga dapat bersumber dari upaya-upaya tertentu yang dilakukan pemerintah daerah dan hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian misalnya adanya upaya pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum milik daerah yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan. Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa belanja modal yang merupakan bagian dari belanja daerah mampu menghasilkan pendapatan daerah karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kegiatan dalam belanja modal.

Pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal

dari pendapatan asli daerah (Sebastiana dan Cahyo, 2016). Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah untuk mampu menghasilkan pendapatan asli daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pendanaan dari pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keungan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras dan Artini, 2017). Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah (Julitawati dkk., 2012).

Salah satu kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja daerah dapat dibedakan menjadi

belanja modal dan belanja berulang pada layanan komunitas sosial, pengeluaran untuk administrasi dan pengeluaran pada pelayanan ekonomi (Udoka dan Anyingang, 2015). *Keynesian teory* menyatakan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Menyah dan Rufael, 2013). Argumen ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aydin *et al.* (2016) yang memperoleh hasil jika belanja pemerintah berada di atas ambang batas maka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumen tersebut juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Amuka *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Mohammed *et al.* (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Ayinde *et al.* (2015) dan Badrudin (2011) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal juga ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Kegiatan belanja modal dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal adalah mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan,

pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Halim, 2014:228-229). Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah, mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada masa yang akan datang, perekonomian daerah yang semakin berkembang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Bojanic (2013) dan Chude dan Chude (2013) berpendapat bahwa belanja modal dapat meningkatkan taraf masyarakat yang tergolong dalam kalangan bawah. Tingginya belanja modal menyebabkan semakin tinggi pula produktivitas perekonomian yang dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah (Darwanis dan Saputra, 2014). Walaupun belanja modal dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian, pemerintah daerah tetap harus mengontrol dan menyesuaikan belanja daerahnya agar tidak melebihi dari pendapatan yang dimiliki. Peningkatan dana yang digunakan untuk belanja pemerintah tanpa peningkatan yang sesuai dalam pendapatan bisa menyebabkan anggaran menjadi defisit (Nwosu dan Okafor, 2014). Jika suatu daerah memiliki entitas belanja modal yang lebih tinggi per kapita dibandingkan dengan pendapatannya maka daerah tersebut harus melakukan penekanan dalam keuangannya (Brusca *et al.*, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) memberikan hasil bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Julitawati dkk. (2012), dan Wenny (2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memberikan indikasi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal juga digunakan sebagai variabel bebas pada penelitian ini karena kegiatan belanja modal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang merupakan proyeksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Yulia dan Mimba (2016) menunjukkan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, sehingga hal tersebut berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu kegiatan belanja modal adalah pembangunan infratraktur. Pembangunan

infrastruktur yang tinggi dapat dikatakan mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Puspitasari dkk., 2015). Menurut Andirfa dkk. (2016), infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Mulyani dan Wibowo (2017) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung. Hasil ini memberikan indikasi bahwa kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) juga mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali? 2) Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali?. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Pendapatan

Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kegunaan teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegunaan praktis yang didapatkan melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan ataupun memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di suatu daerah (Halim, 2014:169). Mahmudi (2009:18) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah.

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu

meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) yang mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Julitawati dkk., (2012), dan Wenny (2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal adalah bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap daerah. Mohammed *et al.* (2015) dan Dewi dan Budhi (2015) juga berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan pada akhirnya akan

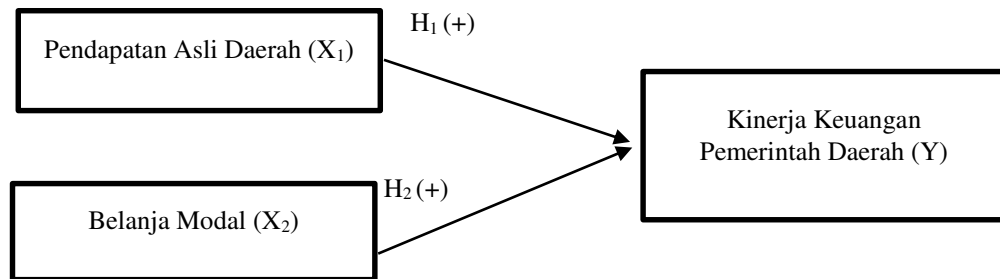
berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah. Pernyataan ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Halim (2014:228) yang menyatakan bahwa kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah diharapkan agar mampu menimbulkan *multiplier effect* bagi perekonomian pada suatu daerah.

Yulia dan Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan berasal dari pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang dilakukan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang tinggi dapat dikatakan mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Puspitasari dkk., 2015). Menurut Andirfa dkk. (2016), infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Mulyani dan Wibowo (2017) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang dipaparkan sebelumnya maka untuk memperjelas arah dari penelitian ini maka kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Lokasi atau ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data yang sudah diolah dan dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2011-2015 yang bersumber dari laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2011-2015.

Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio

pertumbuhan yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Halim (2008:241), rasio pertumbuhan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2008:241), rumus rasio pertumbuhan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota. Kriteria yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan populasi adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah pada setiap daerah melaporkan pendapatan daerahnya berupa pendapatan asli daerah dan belanja daerah berupa belanja modal pada laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2011-2015. 2) Pemerintah pada setiap daerah yang rutin melaporkan data keuangan daerahnya berupa realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2011-2015.

Penentuan sampel menggunakan metode *sampling jenuh* maka sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota. Pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan. Metode observasi nonpartisipan dilakukan dengan cara melakukan observasi pada laporan mengenai Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda melalui program SPSS versi 22. Ada beberapa tahapan analisis yang dilalui dalam teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif. Data yang dianalisis

menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, *mean*, dan *standard deviation*.

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Berdasarkan hal ini maka formulasi persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah
- α = konstanta regresi
- β_1, β_2 = koefisien regresi variabel bebas
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 = Belanja modal (BM)
- e = Tingkat kesalahan pengganggu (standar error)

Tahap-tahap dalam pengujian model penelitian menggunakan uji asumsi klasik diawali uji normalitas yang dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, uji autokorelasi dilakukan dengan melakukan Uji Durbin-Watson, uji multikolinieritas dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), dan uji heterokedastisitas dilakukan dengan melakukan uji glejser.

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika masing-masing koefisien signifikan dari variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari 5% (0,05) yang ditetapkan sebagai derajat kepercayaan, sehingga dapat memberikan arti bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan otonomi daerah sudah diterapkan di salah satu provinsi di Indonesia yaitu di Bali. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah menyebabkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mampu secara mandiri mengatur ataupun mengurus kegiatan yang dilakukan daerah dan kepentingan masyarakatnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah ini bertujuan agar lebih terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan suatu pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 2.
Luas Wilayah Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Jembrana	841,8	14,93
2.	Tabanan	839,33	14,89
3.	Badung	418,52	7,42
4.	Gianyar	368	6,53
5.	Klungkung	315	5,59
6.	Bangli	520,81	9,24
7.	Karangasem	839,54	14,89
8.	Buleleng	1.365,88	24,23
9.	Denpasar	127,78	2,27
Jumlah		5.636,66	100,00

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka Tahun, 2017 (data diolah)

Analisis data penelitian dimulai dengan melakukan analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, *mean*, dan *standard deviation* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	45	22961238000	3001464263000	444012566866.67	699178482462.7
Belanja modal	45	49010250000	949069337000	200914773355.56	205090163835.0
Kinerja Keuangan	45	3.38	41.49	15.7898	6.90646
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3., maka hasil yang diperoleh adalah nilai rata-rata (*mean*) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 444.012.566.866,67 dengan standar deviasi sebesar 699.178.482.462,7. Nilai terendah (minimum) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 22.961.238.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2011 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari pendapatan asli daerah adalah Rp 3.001.464.263.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2015.

Nilai rata-rata (*mean*) dari belanja modal adalah Rp 200.914.773.355,56 dengan standar deviasi sebesar 205.090.163.835,0. Nilai terendah (minimum) dari belanja modal adalah Rp 49.010.250.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari belanja modal adalah Rp 949.069.337.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2014.

Nilai rata-rata (*mean*) dari kinerja keuangan adalah 15,7898 persen sedangkan standar deviasi sebesar 6,90646. Nilai terendah (minimum) dari kinerja keuangan adalah 3,38 persen yang dimiliki oleh Kota Denpasar pada tahun 2015 sedangkan nilai tertinggi (maksimum) dari kinerja keuangan adalah 41,49 persen yang dimiliki oleh Kabupaten Badung pada tahun 2012.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	7.304	2.077		3.516	.001
PAD	.176	.073	.621	2.418	.020
Belanja modal	-.357	.131	-.700	-2.725	.009

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4., persamaan regresi linier berganda penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 7,304 + 0,176X_1 - 0,357X_2 + e \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Belanja Modal

e = Tingkat kesalahan pengganggu (standar eror)

Persamaan regresi linier berganda diatas mampu menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 7,304 menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah dan belanja modal dianggap konstan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 7,304 persen. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,176 menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar satu persen menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 0,176 persen dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar - 0,357 menunjukkan bahwa apabila belanja modal mengalami peningkatan sebesar satu persen menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 0,357 persen dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Uji asumsi klasik diawali dengan melakukan uji normalitas. Pada penelitian ini model regresi dapat dikatakan sudah berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian dikatakan sudah terdistribusi normal ditandai dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 5% (0,05). Hasil uji normalitas dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,284 lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	45
Kolmogorov-Smirnov Z	.987
Asymp. Sig. (2-tailed)	.284

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa Nilai Durbin-Watson (DW-test) adalah sebesar 1,627. Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 45, jumlah variabel bebas (k) sebanyak 2, dan level signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05) diperoleh DW-tabel yaitu nilai dL sebesar 1,43 nilai du sebesar 1,61 sehingga diperoleh nilai $4-dL = 2,57$ dan nilai $4-du = 2,39$. Berdasarkan hasil tersebut maka daerah yang bebas dari autokorelasi terletak pada nilai du (1,61) sampai nilai $4-du$ (2,39), maka nilai DW-test sebesar 1,627 terletak pada daerah bebas dari autokorelasi. Hasil ini memberikan arti bahwa pada model

regresi yang digunakan bebas dari autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.389 ^a	.151	.111	.304582	1.627

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Uji multikolinieritas dianalisis dengan melihat nilai dari *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau nilai VIF kurang dari 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel PAD dan belanja modal secara berturut-turut adalah sebesar 0,306 dan 3,265 yang menunjukkan bahwa nilai *tolerance* PAD dan belanja modal lebih besar dari 10% dan nilai VIF dari PAD dan belanja modal lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil perhitungan ini memberikan indikasi bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.306	3.265
Belanja modal	.306	3.265

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode glejser. Model regresi dikatakan bebas dari gejala heterokedastisitas jika nilai signifikansi variabel bebas

terhadap residual absolut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 5% (0,05). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki nilai signifikansi berturut-turut yaitu 0,335 dan 0,664 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05) sehingga memberikan indikasi bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Hasil Uji Heterokedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	.058	1.074		.054	.957
PAD	.037	.038	.267	.975	.335
Belanja modal	-.030	.068	-.120	-.437	.664

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Uji parsial atau uji t merupakan uji yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika masing-masing koefisien signifikan dari variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05) dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. mengenai hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,020 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,176 menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini memberikan arti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4. mengenai hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari belanja modal adalah sebesar 0,009 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,05. Nilai koefisien regresi belanja modal sebesar -0,357 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini memberikan arti bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Tinggi pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Mahmudi (2009:18) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) yang menemukan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli

daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Darwanis dan Saputra (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian lainnya yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Julitawati dkk. (2012) dan Wenny (2012) yang mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa tahun kemudian sehingga sumber-sumber keuangan yang

dihasilkan melalui kegiatan belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian.

Faktor lain yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Hasil penelitian lainnya yang senada dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015 mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hasil ini memberikan arti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah maka dari itu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang harus ditingkatkan kembali karena dapat meningkatkan penerimaan daerah dan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat sehingga pemerintah daerah mampu membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Terjadinya peningkatan pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya memberikan indikasi bahwa

pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya.

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya menggunakan rasio keuangan terhadap APBD lainnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk tidak menggunakan periode yang bersamaan untuk meneliti mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan pendapatan daerah karena kegiatan belanja modal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Amuka, Joseph. I., Miracle, O. Ezeoke., Fredrick, O. Asogwa. 2016. Government Spending Pattern and Macroeconomic Stability: A Vector Autoregressive Model. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6 (4): 1930-1936.
- Andirfa, Mulia., Hasan Basri., M. Shabri A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5 (3): 30-38.
- Aydin, Celil., Merter Majid., Omer Yılmaz. 2016. The Analysis of Visible Hand of Government: The Threshold Effect of Government Spending on Economic Growth. *International Journal of Trade Economics and Finance*, 7 (5): 170-178.
- Ayinde, Kayode., John Kuranga., Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Corecction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, 5 (6): 858-867.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Denpasar: BPS Bali.
- , 2017. Provinsi Bali Dalam Angka 2017. Denpasar: BPS Bali.

- Badrudin, Rudy. 2011. Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3 (3): 211-223.
- Bojanic, Antonio N. 2013. The Composition of Government Expenditure and Economic Growth in Bolivia. *Journal of Economic*, 50 (1): 83-105.
- Brusca, Isabel., Francesca Manes Rossi., Natalia Aversano. 2015. Drivers for The Financial Condition of Local Government: A Comparative Study Between Italy and Spain. *Journal of Local Self-Government*, 13 (2): 161-184.
- Chude, Nkiru Patricia and Daniel Izuchukwu Chude. 2013. Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Business and Management Review*, 1 (4): 64-71.
- Darwanis dan Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2): 183-199.
- Dewi, N. W. N., dan M. K. S. Budhi. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 (11): 1391-1420.
- Halaskova, Martina and Renata Halaskova. 2016. Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services. *Journal of Local Self-Government*, 14 (3): 379-397.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan M. S. Kusufi. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 15-29.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (19): 7-17.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad., Firma Sulistyowati., Heribertus Andre Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Menyah, Kojo and Yemane Wolde-Rufael. 2013. Government Expenditure and Economic Growth: The Ethiopian Experience, 1950-2007. *The Journal of Developing Areas*, 47 (1): 263-280.
- Mohammed., Ahmed., Salihu. 2015. Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria. *Journal of Arts, Science & Commerce*, 6 (3): 67-77.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1): 57-66.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2): 1-14.
- Nwosu, Damian C., and Harrison O. Okafor. 2014. Government Revenue and Expenditure In Nigeria: A Disaggregated Analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 4 (7): 877-892.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Puspitasari, N.L.P. Lindri., M. Pradana Adiputra., N.L.G. Erni Sulindawati. 2015. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *E-Journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*, 3 (1).
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., Novi Budiarto. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3 (4): 23-32.
- Rosemarry., Chinyeaka Justine., Barisua Barry. 2016. Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 5 (10): 38-54.
- Sebastiana dan Herman Cahyo. 2016. Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 5 (2): 272-285.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Sumawan, I.W., dan I.M. Sukarta. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1727-1754.

- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6 (5): 2360-2387.
- Udoka, Chris O. 2015. The Effect of Public Expenditure on the Growth and Development of Nigerian Economy (1980-2012). *International Review of Management and Business Research*, 4 (3): 823-833.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2 (1): 39-51.
- Yulia, Astiti D.N., dan N.P. Sri Harta Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (3): 1924-1950.